



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 280.1 /I.10/HK/2024

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan optimal, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V dan VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Februari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 280.1 /I.10/HK/2024
 TANGGAL : 1 Februari 2024

RENCANA AKSI RB GENERAL PADA 21 INDIKATOR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Kategori 1 (BAIK)	Menyusun Peraturan Daerah tentang SOTK tentang penyederhanaan sruktur organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	jumlah Peraturan Daerah	1	-	-	-	1	113.727.700	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	> 4	Pembentukan SK Tim tentang Sistem Kerja	Dokumen	Jumlah Dokumen SK Tim tentang Sistem Kerja	-	1	-	-	1	17.981.950	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,85	Koordinasi dengan provinsi	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	-	3	2	-	5	182.997.750	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
			Koordinasi dengan OPD	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	-	4	4	-	8			
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	1	Menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA	Dokumen	Jumlah dokumen Arsitektur SPBE as-is	-	-	1	-	1			

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	>81 dan <91	Penyusunan dokumen perencanaan diselaraskan dengan dokumen-dokumen lain yang terkait.	Kegiatan	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan diselaraskan dengan dokumen-dokumen lain yang terkait	-	1	1	-	2	1.759.575.400	Bappeda	Seluruh unit kerja
	Nilai SAKIP	70 (BAIK)	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan sasaran kabupaten	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan sasaran kabupaten	-	53	53	-	53	209.705.650		Seluruh unit kerja
			Melakukan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi	-	53	53	-	53	15.000.000	Inspektorat	Seluruh unit kerja
			Melakukan peningkatan kompetensi APIP melalui Bimtek Evaluasi SAKIP	Kegiatan	Jumlah kegiatan Bimtek	-	-	1	-	1	10.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Membangun Aplikasi SEBESI-AKIP (Sistem Evaluasi berbasis Aplikasi - Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang terbangun	-	-	-	1	1	45.000.000	Inspektorat	Seluruh unit kerja

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	100%	Penggunaan aplikasi perizinan dalam pemberian/pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah	Persentase izin yang diterbitkan melalui aplikasi perizinan	25%	50%	75%	100%	100%	325.000.000	DPMPPTSP	Seluruh unit kerja
			Penggunaan sistem BPHTB Online	Jumlah	Jumlah pelaporan BPHTB melalui sistem BPHTB online	1750	1750	1750	1750	7000	50.000.000	BPPRD	BPPRD
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	2,5	Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan unit kerja dan pemantauan Zona Integritas	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pembangunan unit kerja dan pemantauan Zona Integritas	7	7	7	7	7	67.239.000	Inspektorat	- Disdukcapil - Perizinan - Disdik - Dinsos - Puskes Way Urang - Puskes Kalianda - RSUD Bob Bazar
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3.15 (Level 3 / Terdefinisi)	Pelaksanaan Bimbingan Teknis SPIP terintegrasi	Kegiatan	Jumlah Bimbingan Teknis SPIP terintegrasi	-	-	1	-	1	29.860.000	Inspektorat	Sampling PD
			Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	Laporan	jumlah laporan hasil Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	-	1	-	-	1	60.966.000		
			Pelaksanaan penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	Laporan	jumlah laporan hasil penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	-	1	-	-	1			

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	70,01	Pembentukan SK Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum	Dokumen	SK Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum	-	-	1	-	1	96.521.900	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Pembentukan SK Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum	Dokumen	SK Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum	-	-	1	-	1			
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	60,01	Regulasi penerapan SRIKANDI	Regulasi	Jumlah regulasi tentang penerapan SRIKANDI	-	4	-	-	4	66.266.550	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Unit Kerja
			Koordinasi ke ANRI terkait SRIKANDI	Kegiatan	jumlah koordinasi ke ANRI terkait SRIKANDI	-	1	-	-	1			
			Penerapan Aplikasi SRIKANDI	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang menerapkan Aplikasi SRIKANDI	-	1	2	2	5			
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,6	Penyusunan kerangka acuan kerja	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerangka Acuan Kerja	1	-	-	-	1	65.853.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
			Berkoordinasi dengan Bappeda	Laporan	Jumlah Laporan koordinasi	-	1	1	1	3			
			Membuat format permintaan data ke PD	Dokumen	Jumlah dokumen format permintaan data	1	-	-	-	1			
			Regulasi kebijakan tentang statistik sektoral	Regulasi	Jumlah Regulasi kebijakan tentang statistik sektoral	1	-	-	-	1			
			Pengolahan data statistik sektoral dari PD	persen	Persentase PD yang mengirimkan data	20%	20%	20%	20%	80%			

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			Penyusunan buku data fakta	Dokumen	Jumlah dokumen buku data fakta	-	-	-	1	1		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
			Pendistribusian Buku data Fakta	Buku	Jumlah buku data fakta	-	-	-	130	130			
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,01	Pemanfaatan sistem pengadaan (SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non Purchasing, Toko Daring dan E-Kontrak)	skor	Capaian Pemanfaatan sistem pengadaan (SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non Purchasing, Toko Daring dan E-Kontrak)	-	-	-	71	71	12.000.000	Bagian PBJ	Bagian PBJ
			Pemenuhan SDM Pengelola PBJ	Orang	Kegiatan pembinaan SDM Pengelola PBJ	-	-	14	0	14	70.000.000		Bagian PBJ
	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Transparan & Akuntabel	Level 3 (proaktif)	terpenuhi 9 (sembilan) domain kematangan UKPBJ	level	terpenuhinya 9 (sembilan) domain kematangan UKPBJ	-	-	-	Level 3 (proaktif)	Level 3 (proaktif)	12.000.000		Bagian PBJ
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah Tepat waktu	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah	-	-	1	1	2	1.605.712.200	BPKAD	Seluruh unit kerja
			Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib, transparan dan Akuntabel	2281	2281	2281	2281	9124	655.937.900		Seluruh unit kerja

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Pegelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK		Koordinasi dan Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dengan seluruh Perangkat Daerah	Laporan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	1	-	-	-	1	330.726.500	BPKAD	Seluruh unit kerja
			Peningkatan penatausahaan BMD dan koordinasi terkait BMD baik diseluruh Perangkat Daerah maupun Instansi vertikal	Persentase	Persentase PD Memiliki Kevalidan Data Aset	100%	100%	100%	100%	100%			1.426.644.850
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	85%	Melakukan koordinasi dan supervisi kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut atas temuan BPK RI	laporan	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah	-	1	-	1	2	202.012.200	Inspektorat	Sampling PD
laporan	pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK	-	1	-	1	2							
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	Memetakan seluruh Jabatan Fungsional di Unit Kerja dengan Data Riil sesuai dengan keahliannya dan pendidikannya	Dokumen	Dokumen Jabatan Fungsional di Unit Kerja dengan Data Riil sesuai dengan keahliannya dan pendidikannya	1	1	1	1	4	85.085.450	1. BKD 2. Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			Melakukan fasilitasi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah pegawai yang berubah status jenjang Jabatan Fungsional	50	50	50	50	200			

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dalam Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional dan diberhentikan dari Jabatan Fungsional	40	20	20	20	100		1. BKD 2. Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	100%	Membuat regulasi pelaksanaan manajemen talenta pegawai	dokumen	Peraturan Kepala Daerah tentang manajemen talenta	1	-	-	-	1	76.089.800	1. BKD 2. Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			Pemetaan jabatan eselon III melalui asesmen	dokumen	Dokumen hasil pemetaan jabatan eselon III melalui asesmen	-	-	1	-	1			
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	Monitoring implementasi Penilaian Kinerja melalui E-KINERJA setiap triwulan	Kegiatan	Persentase capaian ASN yang telah melakukan Input Data Kinerja melalui E-KINERJA setiap triwulan	60%	70%	80%	90%	90%	287.613.500	1. BKD 2. Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			Persentase jumlah ASN dengan nilai SKP E-Kinerja minimal "BAIK"	dokumen	Persentase Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	60%	70%	80%	90%	90%			
			Peningkatan pemahaman tim pengelola sistem merit	Kegiatan	Jumlah kegiatan Peningkatan pemahaman tim pengelola sistem merit	1	-	-	-	1			

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	175 (Skor komposit aspek penerapan sistem merit)	Melaksanakan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya;	orang	Profil kompetensi Jabatan Administrator	-	-	100	-	100	788.344.200	1. BKD 2. Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			Melaksanakan promosi ke Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan berdasarkan pada pertimbangan kompetensi (hasil asesmen atau uji kompetensi)	Kegiatan	Jumlah kegiatan promosi ke Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	3	1	1	1	6			
			Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai baik metode klasikal maupun nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai;	orang	Jumlah pegawai yang dilakukan pengembangan kompetensi melalui metode klasikal maupun nonklasikal	-	-	50	-	50			
			Mengidentifikasi pegawai dengan kinerja bermasalah dalam pemantauan kinerja, melakukan pembinaan bagi pegawai dengan kinerja bermasalah, serta membangun dan menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap hasil pembinaan kinerja tersebut	Kegiatan	Kegiatan Identifikasi masalah kinerja	-	1	1	1	3			

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	65,4 (B)	Pembentukan SK Tim Survei Implementasi Core Values ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen SK Tim Survei Implementasi Core Values ASN	-	-	1	-	1	17.981.950	Bagian Organisasi	Seluruh unit kerja
	Employer Branding	Nilai Employer branding " Good)	Melakukan survei implementasi Core Values ASN	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah implementasi Core Values ASN	-	12	12	12	36			
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,50 (B)	Mendorong pelaksanaan SKM pada UPP yang belum melaksanakan	Dokumen	Dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	-	-	-	2	2	17.981.950	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan
	Indeks Pelayanan Publik	3,51	Peningkatan hasil Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah	Koordinasi Pelayanan Publik pada penyelenggaraan layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	-	-	-	9	9	30.054.350	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	78,5	Peningkatan hasil Standar Pelayanan Publik	Jumlah	Koordinasi Laporan Pelayanan Publik	-	-	-	1	1	30.054.350	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSANBUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 280.1 /I.10/HK/2024
 TANGGAL : 1 Februari 2024

RENCANA AKSI RB TEMATIK KEMISKINAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2024

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/ stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Tema: Kemiskinan															
Data P3KE dan DTKS yang ada belum 100% valid	Tersedianya data base pengentasan kemiskinan yang terpadu	1 data terpadu by nam by adress by NIK	100%	Melakukan verifikasi dan validasi data P3KE	Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah melakukan verifikasi dan validasi data P3KE	60	60	60	80	260	Terkait	100.000.000	Bappeda	Masing-Masing Kecamatan
Rendahnya pemahaman aparatur desa dan kelurahan tentang kriteria pengajuan data DTKS	Meningkatnya pemahaman aparatur desa dan kelurahan terhadap kriteria pengajuan data DTKS	Jumlah Aparatur desa dan kelurahan yang memahami kriteria pengajuan data DTKS dengan mendapatkan nilai 70 saat tes	260	Melakukan sosialisasi kriteria pengajuan data DTKS	Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi	-	-	-	2	2	Terkait	-	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Belum semua PD menggunakan data P3KE untuk basis data kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya peta proses bisnis yang terpadu	Jumlah dokumen peta proses bisnis yang terpadu	1 Dokumen	Pemanfaatan data dalam program kegiatan pengentasan kemiskinan	PD	Jumlah PD yang memanfaatkan data P3KE	17	17	17	17	17	Tidak terkait	162.210.000	Bappeda	17 PD yang memanfaatkan data P3KE

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/ stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Belum seluruhnya masyarakat memiliki jaminan kesehatan	Meningkatnya persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan	persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100%	Melakukan rekonsiliasi data PBI bersama dengan pimpinan Pemerintah Daerah dan BPJS ketenaga kerjaan'	Kegiatan	Jumlah kegiatan rekonsiliasi	1	1	1	1	4	Terkait	-	Bappeda	Dinas sosial dan Dinas Kesehatan Disdukcapil Disnaker BPJS Kesehatan
Perlunya dilakukan pengawasan internal terkait program pengentasaan kemiskinan	Terwujudnya pengawasan terhadap sasaran/program pengentasaan kemiskinan	Persentase Perangkat Daerah Pengampu Sasaran/Perogram kemiskinan yang dilakukan pengawasan	55%	Melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah pengampu sasaran/program meningkatkan akses pelayanan dasar	Kali	Jumlah kegiatan pengawasan	0	0	0	3	3	Tidak terkait	25.000.000	Inspektorat	Inspektorat
				Melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah pengampu sasaran/program Stabilitas harga bahan pokok	Kali	Jumlah kegiatan pengawasan	0	0	0	1	1	Tidak terkait			
				Melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah pengampu sasaran/program Peningkatan investasi	Kali	Jumlah kegiatan pengawasan	0	0	0	1	1	Tidak terkait			
				Melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah pengampu sasaran/program Meningkatkan kualitas	Kali	Jumlah kegiatan pengawasan	0	0	0	1	1	Tidak terkait			

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/ stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				tenaga kerja											
Belum adanya inovasi dibidang pengentasan kemiskinan	Tersedianya inovasi pengentasan kemiskinan dalam rangka menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan rehabilitasi melalui Gaserbu	5	Gerakan Sehari Seribu (Gaserbu) : Sedekah dari ASN Kab. Lampung Selatan untuk Bedah Rumah masyarakat miskin	PD	Perangkat daerah yang melaksanakan Gaserbu	0	0	36	36	36	Terkait	-	Perkim	Seluruh PD

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 280.1 /I.10/HK/2024
 TANGGAL : 1 Februari 2024

RENCANA AKSI RB TEMATIK PENINGKATAN REALISASI INVESTASI
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Tema : Peningkatan Investasi															
Belum adanya regulasi terkait Peta Potensi Investasi Daerah	Tersedianya Peta Potensi Investasi Daerah	Jumlah Regulasi Peta Potensi Investasi	1 Regulasi	Menyusun Regulasi terkait peta potensi investasi daerah	Dokumen	Jumlah regulasi yang disusun	-	-	-	1	1	Terkait	0	DPMPPTSP	DPMPPTSP
Belum semua peta potensi daerah ada dalam aplikasi	Tersedianya informasi peta potensi investasi Daerah didalam aplikasi	Jumlah Data	3 Data Potensi Investasi Daerah yang dapat diakses melalui aplikasi peta potensi	Mengumpulkan informasi peta potensi investasi daerah dan dilakukan input ke dalam aplikasi	Data	Jumlah Data Potensi Investasi Daerah yang di input	-	2	-	1	3	Terkait	65.000.000	DPMPPTSP	DPMPPTSP
Belum optimalnya regulasi terkait Iklim Investasi yang kondusif sesuai dengan tata ruang wilayah	Tersedianya Regulasi terkait Iklim Investasi yang kondusif sesuai dengan tata ruang wilayah	Jumlah Regulasi iklim investasi sesuai tata ruang	2 Regulasi	Melakukan Revisi regulasi terkait Iklim Investasi yang kondusif sesuai dengan tata ruang wilayah	Dokumen	Jumlah draf dokumen regulasi terkait Iklim Investasi sesuai dengan tata ruang wilayah	-	-	1	-	1	Tidak Terkait	0	PUPR	PUPR

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
		Jumlah batas Kecamatan yang telah ditetapkan dengan Perda	17 Kecamatan	Melakukan rekonsiliasi batas wilayah Kecamatan	Kegiatan	Jumlah kegiatan rekonsiliasi	0	0	2	0	2	Terkait	2.500.000	TAPEM	TAPEM dan PD Terkait
				Memetakan batas wilayah kecamatan	Dokumen	Jumlah dokumen penetapan batas wilayah	-	-	-	1	1	Terkait	0	TAPEM	TAPEM dan Bag Hukum
		Jumlah batas desa yang telah ditetapkan dengan Perkada	256 Desa	Melakukan rekonsiliasi batas wilayah Kecamatan	Kegiatan	Jumlah kegiatan rekonsiliasi	0	0	2	0	2	Terkait	4.000.000	DPMD	DPMD dan PD Terkait
				Memetakan batas wilayah Desa	Desa	Jumlah desa yang telah sepakat dan ditetapkan batas wilayahnya	224	0	0	32	256	Terkait	0	DPMD	DPMD dan Bagian Hukum
Belum adanya SOP pelayanan perizinan PBG lintas sektoral	Tersedianya SOP perizinan PBG lintas sektoral	Jumlah SOP perizinan PBG lintas sektoral	1	Menyusun dan menetapkan SOP perizinan PBG	Dokumen	Jumlah dokumen SOP	-	1	-	-	1	Terkait	0	Bagian Organisasi dan Bag Hukum	DPMPPTSP & PUPR
Masih kurangnya pemahaman pelaku IKM/UMKM tentang Perizinan OSS	Meningkatnya pemahaman pelaku IKM/UMKM untuk mendaftarkan perizinan melalui OSS	Jumlah pelaku IKM/UMKM yang mengikuti sosialisasi dan mendapatkan nilai postes 70	240	Sosialisasi tentang perizinan OSS	Kegiatan	Jumlah Sosialisasi tentang perizinan OSS	0	3	4	0	7	Terkait	74.250.000	DISKOP UMKM	DPMPPTSP & Diskop UMKM
Penerapan Reward & Punishment	Meningkatnya kinerja SDM pelayanan perizinan	Jumlah SDM yang mendapatkan Reward	1 Orang	Memberikan reward & punishment	Orang	Jumlah Orang yang menerima Reward & Punishment	-	-	-	1	1	Tidak Terkait	0	DPMPPTSP	DPMPPTSP

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Masih Rendahnya Kepatuhan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh pelaku usaha	Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh pelaku usaha	jumlah peningkatan kepatuhan pelaporan penanaman modal oleh pelaku usaha dibanding tahun lalu	108	Monitoring dan Evaluasi terkait kelengkapan penanaman modal	Kegiatan	Kegitan monev yang dilakukan	4	4	4	4	16	Terkait	DAK	DPMPTSP	DPMPTSP
				Sosialisasi tentang laporan kegiatan penanaman modal	Kegiatan	Jumlah Kegiatan sosialisasi	-	1	2	1	4	Terkait	DAK		

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 280.1 /I.10/HK/2024
 TANGGAL : 1 Februari 2024

RENCANA AKSI RB TEMA DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
Belum adanya data stunting yang terintegrasi	Tersedianya 1 data penanganan stunting yang terintegrasi	Persentase data stunting yang terintegrasi didalam aplikasi	100%	Melakukan pembahasan / Rapat Rancangan awal aplikasi dan proses bisnis aplikasi MATA elang kepada Dinas Terkait	Kegiatan	Jumlah Rapat yang dilakukan	0	2	1	0	3	Terkait	180.000.000	Kominfo	Tim TPPS Kab.Lam-Sel
				Membangun aplikasi MATA elang pembangunan	Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang terbangun	0	0	0	1	1			Kominfo	Kominfo
Belum tercapainya target indikator program skrining HB pada remaja putri kelas 7 dan 10	Tercapainya target indikator program skrining HB pada remaja putri kelas 7 dan 10	jumlah sasaran remaja putri kelas 7 dan 10 yang di skrining HB	90%	Melaksanakan kegiatan skrining HB remaja putri kelas 7 dan 10	%	persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang di skrining HB	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%	90%	terkait	34.388.000	Dinas Kesehatan	28 Puskesmas
Masih tingginya prevalensi ibu hamil KEK	Tercapainya target prevalensi ibu hamil KEK	Likar lengan atas ibu hamil kurang dari 23,5cm	<10%	Terlaksananya pemberian PMT lokal kepada ibu hamil KEK	%	Persentase ibu hamil yang kekurangan energi kronis mendapat tambahan asupan zat gizi	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	3.281.760.000	Dinas Kesehatan	28 Puskesmas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
				Terlaksananya pemberian TTD pada ibu hamil	%	Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi TTD minimal 90 tablet selama kehamilan	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan	28 Puskesmas
Masih rendahnya pemahaman remaja tentang pemenuhan gizi	Meningkatnya pemahaman remaja terkait pemenuhan gizi	Persentase remaja yang mengikuti kegiatan aksi bergizi yang mendapatkan nilai post tes 70	80%	Melakukan kegiatan aksi bergizi untuk remaja dengan sosialisasi tentang gizi dan TTD	Kali	Jumlah kegiatan aksi bergizi untuk remaja	0	0	1	0	1	Terkait	16.540.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Masih kurangnya pemahaman TPK tentang pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting	Meningkatnya pemahaman TPK Terkait pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting'	Jumlah TPK yang mendapatkan nilai 70 pada saat post test dalam peningkatan kapasitas kader	80%	Melakukan peningkatan kapasitas kader di wilayah kecamatan	Kecamatan	Jumlah wilayah kecamatan	0	8	9	0	17	Tidak terkait	320.000.000	Dalduk KB	Dalduk KB
Masih rendahnya capaian kinerja pendampingan TPK terhadap keluarga berisiko stunting	Meningkatnya capaian kinerja pendampingan yang dilakukan oleh TPK kepada keluarga berisiko stunting	Persentase capaian pendampingan yang dilakukan oleh TPK kepada keluarga berisiko stunting	90%	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pendampingan melalui aplikasi ELSIMIL	Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi	1	1	1	1	4	Tidak terkait		Dalduk KB	Dalduk KB
				Melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting oleh TPK	%	Persentase Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	0%	30%	30%	30%	90%	terkait	4.699.800.000	Dalduk KB	TPK
masih tingginya angka unmed Need yaitu 10,76 %	Terwujudnya pemahaman masyarakat akan pentingnya KB	persentase Menurunnya unmed need	10,45 %	Melakukan pelayanan KB Bergerak	Kali	Jumlah pelayanan KB	1	2	0	0	3	Terkait	144.810.200	Dalduk KB	Dalduk KB
				Melakukan promosi dan konseling	Kali	Jumlah kegiatan promosi dan konseling	0	0	17	0	17	Terkait	9.810.000	Dalduk KB	Dalduk KB

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
Belum adanya pengawasan terkait kasus stunting	Terlaksananya Pengawasan Kasus Stunting (AKS)	Jumlah kasus berisiko stunting yang mendapatkan rekomendasi penanganan	1	Melakukan audit kasus stunting	Kali	Jumlah kegiatan audit	1	0	1	0	2	Terkait	80.000.000	Daldu KB	Daldu KB dan Tim AKS
		Persentase tindak lanjut rekomendasi	100%	Melakukan evaluasi tindak lanjut audit kasus stunting	Kali	Jumlah kegiatan evaluasi tindak lanjut	0	1	0	1	2	Terkait		Daldu KB	Daldu KB dan Tim AKS
Masih rendahnya akses air minum aman, layak dan berkelanjutan yang memenuhi kriteria 4K (Kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan)	Meningkatnya akses air minum aman masyarakat melalui jaringan perpipaan	Peningkatan persentase rumah yang memiliki sambungan air minum	18	Melakukan pembangunan SPAM	Desa	Jumlah desa yang memiliki SPAM	0,00%	30%	30%	40%	100%	terkait	3.600.000.000	PUPR	PUPR
			10	Melakukan peningkatan kapasitas SPAM	SPAM	Jumlah SPAM yang dilakukan peningkatan	0,00%	30%	30%	40%	100%	terkait	2.000.000.000	PUPR	PUPR
			232	Melakukan perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah	KK	Jumlah Rumah yang terpasang sambungan air minum	0,00%	30%	30%	40%	100%	terkait	1.150.000.000	PUPR	PUPR
Masih rendahnya akses sanitasi aman	Meningkatnya akses sanitasi aman masyarakat melalui jaringan perpipaan	Peningkatan persentase rumah yang memiliki akses sanitasi	265	Melakukan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPAL-D) Individual dan komunal	KK	Jumlah Rumah yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPAL-D)	0,00%	30%	30%	40%	100%	terkait	1.600.000.000	PUPR	PUPR
Masih rendahnya pemahaman guru paud terkait dengan pencegahan stunting	Meningkatnya pemahaman guru paud terkait pencegahan stunting	Persentase guru paud yang mengikuti peningkatan pemahaman yang mendapatkan nilai 70	70%	Melakukan Bimtek/Sosialisasi pencegahan stunting kepada Guru Paud	Paud	Jumlah Paud yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi	0	7	11	13	31	terkait	171.307.600	Dinas Pendidikan	Dinas Terkait
Masih rendahnya pemahaman KPM PKH terkait pentingnya program stunting	Meningkatnya pemahaman KPM PKH terkait pentingnya pencegahan stunting	Persentase KPM PKH yang berada dilokus bstunting (Kec. Natar, Sragi, Katubung) yang menjawab pertanyaan kuesioner dengan 70%	80%	Melakukan sosialisasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) oleh pendamping PKH untuk pencegahan stunting	Kali	Jumlah Sosialisasi	3	3	3	3	12	Terkait	Tidak ada anggaran	Dinsos	Dinsos

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
				Melakukan monitoring terhadap kegiatan sosialisasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) oleh pendamping PKH untuk pencegahan stunting	Kali	Jumlah Monev	3	4	4	4	15	Terkait	5.670.000	Dinsos	Dinsos
				Melakukan pemberian buku saku / buku pintar bagi keluarga penerima program PKH pada lokus stunting	Buku	Jumlah buku saku yang dibagikan	500	500	500	1000	2500	Terkait	21.250.000	Dinsos	Dinsos
Masih rendahnya layanan sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin berisiko stunting	Meningkatnya layanan sosial untuk masyarakat miskin berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin bersyarat yang menerima bantuan PKH	13,68 %	Melakukan layanan sosial	Orang	Persentase jumlah penyaluran bantuan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin bersyarat Sesuai kuota yang ditetapkan oleh Kemensos	100%	100%	100%	100%	100%	terkait	APBN	Dinsos	Dinsos
		Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin bersyarat yang menerima bantuan BPNT	18,26 %		%	Persentase penyaluran Bantuan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai sesuai kuota yang ditetapkan oleh Kemensos	100%	100%	100%	100%	100%	terkait	APBN	Dinsos	Dinsos

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
		Persentase masyarakat dengan status miskin yang menerima bantuan PBI APBN	79,61 %		%	Persentase bantuan PBI yang tersalurkan sesuai kuota yang ditetapkan oleh Kemensos	100%	100%	100%	100%	100%	terkait	APBN	Dinsos	Dinsos

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG  ERMANTO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 280.1 /I.10/HK/2024
 TANGGAL : 1 Februari 2024

**RENCANA AKSI RB TEMATIK PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stak eholder utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
Belum seluruhnya SDM pengelola PBJ memiliki sertifikat fungsional tertentu	Meningkatnya jumlah fungsional tertentu	Jumlah SDM PBJ yang telah memiliki Sertifikat Fungsional Tertentu	2 orang	Mengikuti uji kompetensi Fungsional Tertentu	Orang	Jumlah SDM UKPBJ yang mengikuti uji kompetensi	0	0	2	0	2	Tidak Terkait	12.000.000	BPBJ	BPBJ
Belum adanya SDM yang berkompeten terkait TKDN	Meningkatnya kompetensi SDM terkait TKDN	Tersedianya SDM yang berkompeten terkait TKDN	2 Orang	Mengikuti DIKLAT TKDN	Orang	Jumlah SDM yang mengikuti DIKLAT TKDN	0	2	0	0	2	Tidak Terkait	46.000.000	Perindag	Perindag
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang Belum Matang	Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	85,25 (Level Pro Aktif)	Melakukan revisi pada level manajemen pengadaan sesuai arahan LKPP	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Pengadaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	1.333.333	UKPBJ	UKPBJ
				Mengumpulkan bukti dukung pada level Manajemen Penyedia	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemn Penyedia	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	1.333.333	UKPBJ	UKPBJ
				Melengkapi bukti dukung pada level Manajemen Kinerja	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Kinerja	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	1.333.333	UKPBJ	UKPBJ
				Mengupdate bukti dukung pada level Manajemen Risiko	Kegiatan	Peningkatan Domain Proses Manajemen Resiko	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	1.333.333	UKPBJ	UKPBJ

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
				Meng-update data dukung level Pengorganisasian Kelembagaan	Kegiatan	Peningkatan Domain Pengorganisasian Kelembagaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	1.333.333	UKPBJ	UKPBJ
				meng-update Tugas/Fungsi Kelembagaan	Kegiatan	Peningkatan Domain Tugas/Fungsi Kelembagaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	1.333.333	UKPBJ	UKPBJ
				Meng-update Perencanaan SDM Pengadaan	Kegiatan	Peningkatan Domain Perencanaan SDM Pengadaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	1.333.333	UKPBJ	UKPBJ
				Merevisi bukti dukung pada level Pengembangan SDM Pengadaan	Kegiatan	Peningkatan Domain ; Pengembangan SDM Pengadaan	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	1.333.333	UKPBJ	UKPBJ
				Merevisi Sistem Informasi	Kegiatan	Peningkatan Domain Sistem Informasi	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	1.333.333	UKPBJ	UKPBJ
Masih rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi TKDN - IK	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi TKDN - IK	Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi TKDN- IK	80 IKN	Optimalisasi sosialisasi dan pendampingan terkait pemahaman proses sertifikasi TKDN- IK	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi	0	0	80	0	80	Terkait	0	Perindag	Perindag dan UKPBJ
Belum optimalnya regulasi daerah terkait P3DN dan UMKM	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi TKDN - IK	Jumlah regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	1 Regulasi	Penerbitan regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	Dokumen	Jumlah Regulasi daerah	0	0	1	0	1	Terkait	0	Perindag	Tim P3DN
Barang/jasa Produk Dalam Negeri (PDN) yang dibutuhkan belum dipenuhi oleh penyedia	Tersedianya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan	% barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi	Realisasi Pengunaan Barang/ Jasa PDN 60%	Melakukan business matching antara UKPBJ, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia)	Kegiatan	Kegiatan bussiness matching	1	0	0	0	1	Terkait	35.000.000	UPBJ	Tim P3DN

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
				Membuat MoU dengan Perusahaan Swata/BUMN/BUMD untuk mendukung program P3DN di Kab. Lam-Sel	MoU	Pelaksanaan MOU dengan pelaku usaha dan UMKM	0	0	0	1	1	Tidak Terkait	0	Perindag & Bag Kerjasama	Tim P3DN dan Stakeholder Terkait
				Melakukan monev harga dan aktifitas penyedia di e-katalog	Kegiatan	Pelaksanaan Monev	1	0	0	0	1	Tidak Terkait	0	UPBJ	Tim P3DN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 280.1 /I.10/HK/2024
 TANGGAL : 1 Februari 2024

RENCANA AKSI RB TEMATIK PENGENDALIAN INFLASI
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Belum adanya kerjasama antar daerah terkait pemenuhan pangan	Terwujudnya kerjasama antar daerah terkait pemenuhan pangan	Jumlah Kerjasama	1 Mou	Melakukan kerja sama antar daerah untuk memenuhi ketersediaan pangan	Daerah	Jumlah daerah yang dilakukan kerja sama	0	0	0	1	1	Terkait	-	Bagian Perekonomian	1. DKP 2. BAG KERJASAMA BAG. HUKUM
Tidak stabilnya harga bahan pokok	Terwujudnya Harga bahan pokok yang terjangkau	Menurunnya koefisien variasi harga pangan	<20%	Melaksanakan operasi pasar murah	kali	Operasi pasar yang dilakukan	0	7	6	4	17	Terkait	180.000.000	Disdagprin	Disdagprin
				Melaksanakan Gerakan Pangan Murah	Kali	Gerakan Pangan Murah yang dilakukan	20	10	5	5	40	Terkait	100.000.000	DKP	DKP
Banyaknya lumbung pangan yang tidak layak digunakan	Tersedianya lumbung pangan yang layak	Peningkatan jumlah lumbung pangan yang layak	1 Unit	Rehabilitasi Lumbung Pangan	Unit	Jumlah lumbung pangan yang dilakukan rehabilitasi	0	0	1	0	1	Terkait	25.000.000	DKP	DKP

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Masih rendahnya kompetensi pengelolaan lumbung pangan	Meningkatnya kompetensi pengelola lumbung pangan dengan Pelatihan	Persentase pengelola lumbung pangan yang mengikuti pelatihan dengan nilai 70 pada post tes	50%	Melakukan pelatihan pengelolaan lumbung pangan	Kali	Jumlah pelatihan yang dilakukan	0	0	1	0	1	Terkait	6.000.000	DKP	DKP
Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan konsumsi bahan pangan substitusi/non-beras	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait konsumsi bahan pangan substitusi/non-beras	Penurunan persentase konsumsi beras masyarakat	-1,50%	Melakukan Sosialiasi menu B2SA di sekolah Dasar	Kali	Jumlah sosialisasi	0	4	1	0	5	Terkait	23.008.250	DKP	DKP
		Peningkatan konsumsi pangan lokal (singkong, jagung, pisang dll)	+1,5%	Memberikan pelatihan pengolahan pangan lokal kepada masyarakat	Kali	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilakukan	0	3	1	0	4	Terkait	37.716.400	DKP	DKP
Rendahnya produksi perikanan tangkap	Meningkatnya jumlah nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan	Persentase peningkatan nelayan yang memanfaatkan alat penangkapan ikan dibandingkan	14,50%	Melakukan pemberian hibah mesin kapal nelayan	Paket	Jumlah mesin kapal yang di hibahkan kepada kelompok nelayan	0	0	22	0	22	Terkait	201.104.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
		n dengan tahun lalu		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan memberikan hibah kapal	Paket	Jumlah Kapal Penangkapan Ikan untuk Perairan Laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan dan sarana pendukung penangkapan ikan yang diberikan kepada kelompok nelayan	0	0	7	0	7	Terkait	675.500.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Rendahnya Produksi Perikanan Budidaya air tawar	Meningkatnya jumlah produksi budidaya ikan	Jumlah peningkatan tonnase perikanan budidaya dibandingkan tahun lalu	653,63	Melakukan pemberian bantuan Bantuan Paket Budikdambe r (Budidaya Ikan Dalam Ember)	Paket	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	0	30	0	0	30	Terkait	30.000.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Melakukan pemberian hibah sarana dan prasarana budidaya air payau	Paket	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	0	0	7	0	7	Terkait	860.000.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				Melakukan pemberian hibah sarana dan prasarana budidaya air tawar	Paket	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	0	0	15	5	20	Terkait	1.325.000.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Rendahnya Produksi Pengolahan Perikanan	Meningkatnya produksi pengolahan Perikanan	Peningkatan jumlah tonnase produksi pengolahan perikanan dibandingkan tahun lalu	29,74	Melakukan rehabilitasi unit pengolahan ikan	Unit	Jumlah unit pengolahan ikan yang dilakukan rehabilitasi	0	0	0	7	7	Terkait	1.400.000.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Masih rendahnya produksi pertanian komoditi terkait invlasi	Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian komoditi terkait invlasi	Tersedianya alat pertanian modern	1.047.882	Pembagian alat corn sheller (pemipil jagung)	alat	Jumlah alat	0	0	4	0	4	Terkait	120.000.000	TPH Bun	TPH Bun
				Pembagian alat hand tractor (alat pengolah tanah)	alat	Jumlah alat	0	0	0	15	15	Terkait	450.000.000	TPH Bun	TPH Bun
Kurangnya Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Menurunnya Tingkat Inflasi daerah	Peningkatan Produksi	1.047.882	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Paket	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun	0	0	13	0	13	terkait	1.454.400.000	TPH Bun	TPH Bun

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
				Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Jumlah Sumur Bor yang Dibangun	0	0	0	6	6	terkait	945.000.000	TPH Bun	TPH Bun
			744	Pengembangan Kawasan Bawang Merah	ha	Jumlah Areal Pertanaman yang dikembangkan	0	0,5	0	0	0,5	terkait	38.813.000	TPH Bun	TPH Bun
			10.717	Pengembangan Kawasan Cabai	ha	Jumlah Areal Pertanaman yang dikembangkan	0	0,5	0	0	0,5	terkait	27.512.000	TPH Bun	TPH Bun
				Cadangan Benih Daerah untuk Bencana	Kg	Jumlah bantuan benih yang diberikan	-	-	-	1.750	1.750	terkait	24.675.000	TPH Bun	TPH Bun
Masih rendahnya Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi pangan dan perdagangan yang berkualitas	Tercapainya Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi pangan dan perdagangan yang	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran dan perbaikan	1,5 KM	Melakukan pelebaran jalan	Km	Panjang jalan	0	30%	60%	10%	100%	Terkait	1.277.396.736	PUPR	PUPR

PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
	berkualitas		50 KM	Rekonstruksi Jalan	Km	Panjang jalan	0	30%	60%	10%	100%	Terkait	73.414.968.453	PUPR	PUPR
		Panjang Irigasi PU yang diperbaiki	1 unit	Pembangunan Embung dan penampung air	Unit	Jumlah Unit	0	30%	60%	10%	100%	Terkait	723.918.768	PUPR	PUPR

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO